

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN SEWU

Disusun Oleh:

Fahrul Ari Budiarto¹⁾, Winarti²⁾, Aris Tri Haryanto³⁾

1.2.3 Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sewu dapat diambil dari berbagai aspek, termasuk dampaknya pada kesejahteraan keluarga miskin, efektivitas pelaksanaan, dan dukungan dari masyarakat. Evaluasi dampak program terhadap kesejahteraan keluarga miskin adalah hal krusial. Seperti halnya peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi peserta PKH. Keberhasilan implementasi PKH juga dapat dievaluasi dari segi efektivitas pelaksanaan. Hal ini mencakup ketepatan sasaran, distribusi bantuan, serta efisiensi administratif dan birokrasi. Dari tingkat partisipasi aktif masyarakat dan tingkat dukungan yang diberikan. Jika masyarakat terlibat dan mendukung program, ini bisa menjadi indikator positif. Rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan. Ini melibatkan penilaian terhadap kelemahan atau tantangan yang ditemui selama implementasi dan memberikan arahan untuk meningkatkannya. Dengan demikian implementasi PKH di Kelurahan Sewu dapat mencerminkan sejauh mana program mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial. Sesuai dengan sumber data penetapan sasaran berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Komunikasi

ABSTRACT

The research results show that the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Sewu Village can be taken from various aspects, including its impact on the welfare of poor families, effectiveness of implementation, and support from the community. Evaluation of the program's impact on the welfare of poor families is crucial. Such as increasing access to education, health and the economy for PKH participants. The success of PKH implementation can also be evaluated in terms of implementation effectiveness. This includes targeting accuracy, distribution of aid, as well as administrative and bureaucratic efficiency. From the level of active community participation and the level of support provided. If the community is involved and supports the program, this can be a positive indicator. Recommendations for continuous improvement. This involves assessing weaknesses or challenges encountered during implementation and providing direction to improve them. In this way, the implementation of PKH in Sewu Village can reflect the extent to which the program achieves its goals of improving welfare and reducing social inequality. In accordance with the target setting data source comes from the Integrated Data for the Poverty Handling Program in accordance with Minister of Social Affairs regulation Number 10/HUK/2016 dated

3 May 2016 concerning the Mechanism for Using Integrated Data for the Poverty Handling Program.

Keywords: Implementation, Program, Communication

A. PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program unggulan yang di klaim pemerintah sebagai salah satu bentuk program perlindungan sosial yang menangani masalah penanggulangan kemiskinan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan PKH di Indonesia dilandasai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, PERPRES No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. PKH menjadi salah satu program *Conditional Cash Transfer* (CCT) yang juga dikenal di dunia dalam menanggulangi kemiskinan yang kronis, sebagai bentuk penanggulangan sosial. Program ini memberikan bantuan dana kepada RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin).

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah mengklaim melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Tujuan utama PKH adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama pada kelompok masyarakat sangat miskin. Untuk saat ini, komponen PKH difokuskan pada sektor kesehatan dan pendidikan, karena keduanya dianggap sebagai inti peningkatan kualitas hidup masyarakat

Program Keluarga Harapan ini harus dilakukan secara profesional, sehingga tidak ada lagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang tidak

mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan tersebut. Seharusnya Program Keluarga Harapan benar-benar memberikan bantuan kepada rumah tangga yang sangat membutuhkannya. Sehingga fungsi program tersebut benar-benar bisa telaksana sesuai dengan prosedurnya (PKH Kelurahan Sewu, 2022).

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sewu?”

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Menurut Lexy J. Moleong (2005 : 4), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya : perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi. Penentuan unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan obyektif, untuk mendeskripsikan penelitian mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sewu.

Teknik penentuan informan bertujuan untuk mendapatkan data dalam penelitian, yaitu peneliti harus mewawancara orang-orang yang terlibat dalam penelitian., namun diperlukan suatu teknik sampling sehingga dapat tepat sasaran dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga.Terkait dengan teknik pengambilan sampel tersebut, maka

dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel tujuan (*Purposive Sampling*). Dalam penelitian kualitatif maksud *purposive sampling* adalah menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber (Moleong, 2000: 165).

Teknik pengumpulan data atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:317) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara terarah, yaitu melalui proses dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Observasi

Adler (dalam Hasyim, 2016), menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar yang fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Observasi dalam penelitian ini adalah observasi terstruktur non partisipan, yang artinya peneliti memposisikan diri sebagai orang yang tidak terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Studi Literatur (Kepustakaan)

Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang teori dan konsep yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Teori dan konsep ini terkait implementasi kebijakan PKH di Kelurahan Sewu. Studi literatur ini didapatkan baik dari penelitian-

penelitian terdahulu, maupun dari informasi jurnal, berita media masa dan sumber literatur lainnya.

4. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:329) Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Melalui dokumentasi peneliti mengumpulkan data melalui dokumen baik yang berbentuk tulisan yang didapatkan dari dokumen pendamping PKH di Kelurahan Sewu, dokumentasi dari penelitian sebelumnya, dan gambar yang didapatkan dari jepretan peneliti sendiri.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sewu, penulis dapat menganalisis bahwa implementasi PKH di Kelurahan Sewu, dapat ditinjau beberapa hal yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan alat untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksakan kebijakan tersebut. Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan.

Analisis komunikasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat memberikan wawasan tentang bagaimana informasi disampaikan, diterima, dan direspon oleh berbagai pihak terkait. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk kesuksesan dan penerimaan program oleh masyarakat.

Komunikasi yang terbuka dan transparan dari pemerintah kepada masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap program. Penjelasan yang jelas tentang tujuan, manfaat, dan persyaratan PKH dapat mengurangi ketidakpastian dan

spekulasi. Penting untuk memastikan bahwa informasi disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat agar pesan tersebut dapat mencapai target audiens dengan baik.

Keterlibatan masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, seperti pertemuan publik, media sosial, dan ruang publik, dapat membangun partisipasi aktif dan dukungan masyarakat. Pertemuan langsung membantu dalam menjawab pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat secara langsung. Perlu lebih menekankan partisipasi masyarakat di tingkat lokal dan memastikan bahwa representasi dari berbagai kelompok masyarakat diperhitungkan.

Proses pengidentifikasi dan seleksi keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada keluarga yang membutuhkan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Pemilihan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atau penerima manfaat berdasarkan rangking kemiskinan terendah. Penetapan sasaran dilakukan dalam rangka perluasan jangkauan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Sumber data penetapan sasaran berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 Tanggal 03 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Adapun kriteria yang masuk dalam kategori peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu ibu hamil atau nifas, anak berusia dibawah 6 tahun, anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun, anak penyandang disabilitas berusia 0-21 tahun.

Kegiatan penetapan sasaran kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut melibatkan

beberapa pendamping Program Keluarga Harapan yang berada di Kelurahan Sewu. Pendamping sudah mendapatkan data para peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan dari Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetapi data tersebut tidak asal diterima begitu saja namun pendamping yang berada di Kelurahan Sewu harus mencocokkan ulang data tersebut dengan peserta langsung, dengan tujuan agar data yang diterima sesuai apa yang telah ditentukan oleh Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 Tanggal 03 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program dirumuskan tanpa ada dukungan sumberdaya yang memadai maka kebijakan akan mengalami kebijakan kesulitan dalam mengimplementasikanya. Sumber daya yang dimaksudkan mencakup jumlah staff pelaksana yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Memadai yang dimaksudkan adalah jumlah para pelaksana harus sesuai dengan jumlah tugas yang dibebankan maupun kemampuannya, dan keterampilan yang dimiliki baik teknis maupun material.

Sumber daya dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) mencakup evaluasi terhadap berbagai aspek, termasuk keuangan, tenaga kerja, infrastruktur, dan informasi. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang efektif sangat penting untuk kesuksesan program.

Anggaran yang memadai dapat

mendukung pendaftaran, pemantauan, dan evaluasi program secara efektif. Sumber daya keuangan yang cukup memungkinkan pemberian bantuan secara konsisten kepada peserta PKH. Perlu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran untuk memastikan efisiensi dan mencegah penyalahgunaan dana. Tenaga kerja yang terlatih dan kompeten dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program, termasuk pendampingan dan penyuluhan kepada peserta PKH. Keterlibatan masyarakat setempat dapat membantu dalam identifikasi peserta yang memenuhi kriteria. Perlu pengelolaan dan pelatihan sumber daya manusia untuk memastikan konsistensi dan kualitas pelayanan.

Seperti yang dijelaskan dari Petugas PKH untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini pertama itu pembentukan Tim koordinasi PKH di Kelurahan Sewu setalah itu malakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi, kepada aparat pemerintah dilingkungan Kelurahan dan masyarakat, tidak hanya selesai juga di sosialisasi akan tetapi juga menyediakan kantor sekretariat di Kelurahan Kelurahan Sewu.

3. Sikap (Disposition)

Disposition atau sikap masyarakat di Kelurahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keberhasilan program. Analisis dan uraian mengenai disposisi atau sikap ini dapat mencakup berbagai aspek.

Mengevaluasi sejauh mana masyarakat di Kelurahan telah menyadari dan memahami keberadaan serta manfaat Program Keluarga Harapan. Jika tingkat kesadaran tinggi, masyarakat cenderung lebih terbuka dan berpartisipasi aktif dalam program. Jika rendah, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman melalui kampanye informasi.

Menilai sejauh mana masyarakat di Kelurahan menerima dan mendukung pelaksanaan PKH. Apakah ada resistensi atau kritik yang signifikan. Jika penerimaan dan dukungan tinggi, program memiliki peluang lebih besar untuk berhasil. Jika ada resistensi, perlu dilakukan pendekatan yang lebih intensif untuk mengatasi ketidakpastian atau kekhawatiran.

Menganalisis sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dalam berbagai tahapan program, seperti pendaftaran, pelatihan, dan pemantauan. Partisipasi aktif mencerminkan keterlibatan positif masyarakat. Jika rendah, perlu dipertimbangkan strategi untuk meningkatkan keterlibatan melalui penyuluhan dan pelibatan komunitas.

Kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, ini seiring dengan apa yang dikemukakan oleh Meter and Horn disposisi yang diartikan sebagai motifasi psikologis para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Menurutnya ada tiga hal yang terdapat didalam disposisi atau sikap pelaksana yang merupakan unsur penting dalam implementasi yaitu:

- a. Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana terhadap kebijakan
- b. Arah respon dari para pelaksana terhadap pelaksana implementasi kebijakan (penerimaan dan penolakan)
- c. Intensitas dari respon.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) akan memberikan pemahaman tentang bagaimana kebijakan dan program tersebut dikelola secara administratif. Struktur birokrasi dapat memengaruhi efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dari program.

Identifikasi departemen atau unit di tingkat pusat dan daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi PKH. Keterlibatan departemen atau unit yang bersangkutan sangat penting untuk koordinasi yang baik dan penyelarasan program dengan kebijakan nasional. Dengan demikian struktur birokrasi dalam pelaksanaan PKH membantu mengidentifikasi kekuatan dan potensi perbaikan. Dengan memahami struktur tersebut, pihak terkait dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan PKH.

Sesuai dengan teori bahwa struktur birokrasi untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui dan bagaimana cara melakukannya, implementasi bisa jadi belum efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi yang ada. Birokrasi merupakan salah satu bahan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksanaan kebijakan.

- a. Prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau yang sering disebut sebagai Standart Operating Procedures
- b. Adapun pengaruh struktur organisasi bagi implementasi SOP adalah menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organi

E. PENUTUP

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sewu dapat diambil dari berbagai aspek, termasuk dampaknya pada kesejahteraan keluarga miskin, efektivitas pelaksanaan, dan dukungan dari masyarakat. Evaluasi dampak program terhadap kesejahteraan keluarga miskin adalah hal krusial. Seperti halnya peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi peserta PKH. Keberhasilan implementasi PKH juga dapat dievaluasi dari segi efektivitas pelaksanaan. Hal ini mencakup ketepatan sasaran, distribusi bantuan, serta efisiensi administratif dan

birokrasi. Dari tingkat partisipasi aktif masyarakat dan tingkat dukungan yang diberikan. Jika masyarakat terlibat dan mendukung program, ini bisa menjadi indikator positif. Rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan. Ini melibatkan penilaian terhadap kelemahan atau tantangan yang ditemui selama implementasi dan memberikan arahan untuk meningkatkannya. Dengan demikian implementasi PKH di Kelurahan Sewu dapat mencerminkan sejauh mana program mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial. Sesuai dengan sumber data penetapan sasaran berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media

Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier, 1989, *Implementation and Public Policy* Lanham, MD: University Press of America.

Drs. Hessel Nogi S, Tangkilisan, M.Si. 2003, *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards*. Yogyakarta: Lukman Offset.

Imam Gunawan, 2013, *Metode*

- Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Indra Bastian. 2005, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga:Jakarta.
- Leo Agustino, 2008, *Dasar-dasar kebijakan publik*, Alfabeta, Bandung.
- Lexy J Moleong. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakara
- Lexy J. Moleong, M.A, 2005 *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Cet. XXI; Jl. Ibu Inggit Garnasih No. 40, Bandung.
- M. Irfan Islamy, 2001, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Erwan Agus dkk. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta. Gava Media.
- S. Wahab, 2005, *Analisis Kebijakasanaan: Dari formulasi ke Implementasi Kebijakasanaan Negara*. Bumi aksara. Jakarta.
- Soenarko, 2005. *Public Policy : Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisis Kebijakasanaan*
- Pemerintah, Surabaya: Airlangga University Press.
- Subarsono, A.G. 2011. *Analisis kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV.
- Wahab, Abdul Solichin. 2012. *Analisis Kebijaksanaan Dari formulasi Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik: (Konsep, Aplikasi dan Implementasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Cetakan I. Bandung: Mandar Maju.
- Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia.
- Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Jurnal :

Kapioru, Evan, Harlan. 2014. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum”. *Jurnal Nominal*/Volume III Nomor 1.

Laoh, Stevianus, dkk. 2016. Evaluasi Proses Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado. Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, ISSN 1907- 4298 , Volume 12 Nomor 2A, Juli 2016 : 315 – 330.

Naditya, Rochyani, Suryono, Agus dan Rozikin, Mochamad. 2013. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) Di Kelurahan Sukun Kota Malang)”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6.

Pratama, Rezki, Teddy. 2015. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Memberi Pelayanan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu)”. *Journal Pemerintahan Integratif*, Volume 3, Nomor 1.

Syahida, Agung, Bayu. 2014. “Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat)”

Taufik, Mhd. dan Isril. 2013.

“Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa”. *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2.

Internet :

<https://saiyanadia.wordpress.com/2010/11/20/peranan-pemerintah-dalam-ekonomi-pembangunan/> peranan pemerintah dalam ekonomi pembangunan/ peranan pemerintah dalam ekonomi pembangunan diakses tanggal 8 Januari 2024.

<https://www.kemsos.go.id/modules> , Mari Kita Mengenal Program PKH. Sumber wacana: Dwi Heru Sukoco diakses tanggal 8 Januari 2024

<https://rekrutmenpkh.kemsos.go.id/> diakses tanggal 8 Januari 2024

<https://rekrutmenpkh.kemsos.go.id/> diakses tanggal 8 Januari 2024

<http://pkh-jawatimur.blogspot.co.id/p/program-keluarga-harapan-program.html>
diakses tanggal 8 Januari 2024

<https://rekrutmenpkh.kemsos.go.id/> diakses tanggal 8 Januari 2024